



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 773/VI/2013

1/JUNI 2013



## Dua Kali Mangkir, KPK Terancam Dipanggil Paksa



# KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2013

Minggu keempat bulan Mei sampai pertama bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 dan 28 Mei 2013, yang antara lain mengagendakan Pandangan Fraksi-Fraksi dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA-2014, Laporan Komisi XI, dan Komisi I mengenai penetapan pejabat publik. Berikut rangkumannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Rapat Paripurna 28 Mei 2013

Rapat Paripurna 28 Mei 2013, mengagendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA-2014. Tanggapan Pemerintah didahului dengan pemberian gambaran mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam menjalankan Strategi dan Rencana Kerja di tahun 2014. Tema Rencana Kerja (RKP 2014) adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan, Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal, diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Selama tahun 2014, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah menyediakan stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan yang akan diambil antara lain: [1] penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN (*resilience & flexibility*) agar responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global; [2] penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktifitas APBN melalui pemberian stimulus fiskal untuk perekonomian domestik, pencapaian target *pro-growth*,



*pro-poor* dan *pro-job*; [3] peningkatan efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBN melalui pengendalian defisit APBN, pengendalian *primary balance* dan *net negative flow* untuk meminimalisir resiko dan menjaga *fiscal sustainability* terhadap potensi tekanan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan *lifting* dan terdepresiasinya nilai tukar.

Pada kesempatan berikutnya, Pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi-Fraksi mengenai beberapa hal, antara lain: masalah Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2014 pada kisaran 6,4-6,9% lebih tinggi daripada sasaran tahun 2013, yang memiliki *outlook* pertumbuhan sekitar 6,2%.

Tanggapan terhadap laju inflasi, pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Dewan bahwa laju inflasi perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil, memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, mengenai asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Pemerintah sependapat agar volatilitas nilai rupiah harus dijaga pada tingkat rendah dan stabil, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya-saing dan stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan BI sebagai langkah antisipasi dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.



Pemerintah sependapat dengan Fraksi-Fraksi, bahwa perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan *lifting* minyak, seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Untuk mengoptimalkan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dilakukan melalui: [1] meningkatkan koordinasi rutin Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, [2] meningkatkan efisiensi operasi, dan optimalisasi fasilitas produksi dengan intensifikasi inspeksi rutin dan [3] menjaga iklim investasi dan meningkatkan daya tarik dalam investasi Migas.

Agenda kedua Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi XI mengenai perpanjangan anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia) Periode 2010-2013. Pimpinan Komisi XI melaporkan bahwa Komisi XI menyetujui pembahasan Calon Anggota BSBI periode 2013-2016 diserahkan kepada Komisi XI, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah.

Selanjutnya karena Masa Jabatan keanggotaan BSBI berakhir pada 15 Maret 2013, maka Komisi IX menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan anggota BSBI atas nama Umar Juoro, Rama Pratama, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Kemudian ternyata Rama Pratama mengundurkan diri dari pencalonan. Oleh karena itu perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BSBI 2010-2013, hanya atas nama Umar Juoro, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Perpanjangan ini sampai dengan pelantikan keanggotaan BSBI terpilih 2013-2016, yang akan dilaksanakan *fit and proper test* dalam Masa Persidangan IV ini. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas keputusan Komisi IX tersebut.

Agenda ketiga Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi I mengenai perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Pusat periode 2010-2013. Keanggotaan KPI Pusat, sesuai dengan Surpres No. 59/P tahun 2010 terdiri dari sembilan anggota yaitu Mochamad Riyanto, Ezki Tri Rezeki Widiandi, Dadang Rahmat Hidayat, Yazirwan Uyun, Iswandi Syahputra, Nina Mutmainnah, Judhariksawan, Idy Muzayyad, dan Azimah Subagijo, yang masa keanggotaannya berakhir pada 25 Mei 2013. Terkait dengan masa keanggotaan tersebut, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 10 ayat (2), maka DPR-RI perlu melakukan proses tahapan seleksi rekrutmen calon anggota KPI Pusat periode 2013-2016.

Komisi I menjadwalkan bahwa tahapan seluruh proses seleksi, termasuk *fit and proper test*, terhadap calon anggota KPI 2013-2016, akan selesai sebelum Masa Persidangan IV, selambat-lambatnya 13 Juli 2013. Pada tanggal tersebut, DPR akan menyampaikan hasil seleksi anggota KPI terpilih kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden. Untuk menghindari kevakuman kepengurusan dalam KPI Pusat, Komisi I memutuskan memperpanjang masa tugas KPI Pusat periode 2010-2013 sampai ditetapkannya keanggotaan KPI Pusat periode 2013-2016 oleh Presiden RI. Selama perpanjangan tersebut, anggota KPI Pusat 2010-2013 dapat melaksanakan tugasnya sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002.

## Lain-lain

Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terhadap persetujuan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang.

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Mei 2013, Pimpinan Badan Anggaran memberikan laporan atas hasil pembahasan terhadap materi Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang. Adapun inti laporannya adalah sebagai berikut:

Atas penugasan Badan Musyawarah DPR-RI/Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus menugaskan pembahasan perihal tersebut kepada Komisi yang membidangi, yaitu Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR-RI, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna, guna mendapatkan persetujuan, selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Pimpinan Badan Anggaran melaporkan bahwa penghapusan piutang pada lima PDAM penanggung utang, oleh Raker Komisi XI dengan menteri Keuangan, dilaporkan telah menyetujui Rencana Penghapusan Piutang Non Pokok (bunga biaya komitmen dan denda) pada 5 PDAM sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57

Adapun Komisi V, juga telah melakukan pembahasan tentang masalah ini, dan telah memberikan persetujuan atas penghapusan piutang 5 PDAM penanggung utang dengan jumlah Rp. 1.044.846.759.939,57.

Sesuai hasil pembahasan Komisi V dan Komisi XI tersebut, Badan Anggaran mengadakan Raker dengan menteri keuangan pada 9 April 2013 dengan hasil: [1] Badan Anggaran menyepakati penetapan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57, yaitu pada: PDAM Kota Semarang sebesar Rp. 238.139.567.751,80; PDAM Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 272.512.003.142,28; PDAM Kota Bandung sebesar Rp. 252.730.301.232,86; PDAM Kota Palembang sebesar Rp. 160.164.146.953,20; PDAM Kota Makasar sebesar Rp. 121.300.740.859,43.

[2] dengan catatan agar Komisi V dan Komisi XI melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap 5 PDAM penanggung utang tersebut dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana kerja (*business plan*).

Rapat Paripurna DPR telah memberikan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan mengenai penetapan penghapusan piutang bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang. Yang selanjutnya, atas persetujuan ini, akan disampaikan kepada Presiden.

# Dua Kali Mangkir, KPK Terancam Dipanggil Paksa



Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia saat menyampaikan aspirasinya mendesak agar DPR segera menuntaskan kasus Century.

**Untuk kedua kalinya KPK mangkir menghadiri undangan Rapat dengan Timwas Century DPR Rabu (29/5) dengan alasan ada hal-hal terkait dengan teknik pemeriksaan yang tidak bisa disampaikan kepada publik. Atas alasan itu Timwas sudah membahas dan memutuskan untuk memanggil kembali KPK, dengan lebih tegas bahwa sesungguhnya alasan KPK tidak masuk akal.**

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat menerima Delegasi Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan Aliansi Waria Anti Korupsi (Awak) di Gedung DPR Rabu (29/5).

Ketua BEM Mohammad Najib Bangun dan Ketua Awak Davina sama-sama mendesak agar DPR segera menuntaskan kasus Century dengan menetapkan Boediono dan Sri Mulyani sebagai tersangka. Selain itu mereka mendesak KPK segera menuntaskan skandal Century sebelum SBY lengser pada tahun 2014.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan, KPK sebagai sesama lembaga negara hendaknya menghormati Dewan dan selayaknya harus hadir. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa diketahui publik ada mekanisme

tersendiri. Karena itu dalam pemanggilan nanti akan ditegaskan bagaimana posisi sesama lembaga dan ada aturan dalam undang-undang bahwa DPR bisa memaksa KPK kalau lembaga itu terus menerus tidak memenuhi undangan DPR.

“Kita benar-benar akan melaksanakan kembali rapat tanggal 5 Juni, dan berharap KPK bisa hadir. Sebelumnya akan dilakukan komunikasi agar benar-benar memahami posisi sebagai sesama lembaga negara sesuai kontistensi yang ada,” jelas dia.

Lebih lanjut Pimpinan DPR dari FPKS ini menyatakan, atas nama Pimpinan dan anggota Timwas Century menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan aspirasi yang disampaikan sebangun dengan Timwas. “Kami ingin penegakan hukum berjalan dengan baik, tetapi juga jangan melecehkan hukum.

Kita juga tidak ingin kleptokrasi, tetapi menghormati demokrasi. Timwas akan melanjutkan proses ini mengawal kasus Century dengan sebaik-baiknya,” tandas Sohibul Iman.

Menanggapi hal itu Muhammad Najib Bangun mewakili BEM se Indonesia menanyakan apakah nanti tanggal 5 Juni akan terjadi lagi adegan ini dimana rapat Timwas kembali tidak dihadiri KPK. Apakah dipastikan KPK datang, kalau tidak datang bisakah diseret, mahasiswa siap membantu menyeret KPK ke DPR.

Anggota Timwas Nudirman Munir dari Fraksi Golkar menambahkan, ada ketentuan dalam pasal 72 UU MD3 terbukanya upaya paksa untuk memanggil KPK. Mahasiswa menanggapi, “Gunakan hak itu” dan dijawab “Siapa akan kami gunakan” jawab Nudirman tegas. (mp) Foto: wy/Parle.

## Komisi III Pertanyakan Ketidakhadiran KPK di Timwas Century



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika didampingi tiga Pimpinan Komisi III saat rapat anggaran dengan KPK.

Komisi III DPR RI mempertanyakan ketidakhadiran KPK untuk kedua kalinya dalam rapat dengan Timwas Century. Hal ini mengemuka saat RDP membahas RAPBNP 2013 yang berlangsung pada waktu yang sama dan dihadiri Zulkarnaen salah seorang pimpinan KPK.

“Saya minta konfirmasi Pak Zul apa yang mendasari ketidakhadiran KPK dalam rapat Timwas Century. Berdasarkan konstitusi dan UU MD3 kewenangan DPR untuk mendengar perkembangan dan keharusan KPK untuk hadir,” kata anggota Komisi III Syarifudin Sudding saat rapat di

Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/13).

Sementara itu Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika menyebut sebagai mitra kerja, KPK telah membuat komisi yang dipimpinnya dalam posisi sulit. “KPK tidak hadir di Timwas tapi bicara anggaran di Komisi III datang, wajah ini tidak baik kita pertontonkan ke publik dalam konteks komunikasi antar lembaga. Ada kesan KPK alergi pengawasan, hanya datang kalau bicara anggaran. Ini menyulitkan kami sebagai mitra bapak ketika kami harus berhadapan di tengah lembaga kami,” paparnya.

Terkait rapat dengan Timwas Century, ia menyebut ada masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dalam rapat sebelumnya KPK tidak datang karena menolak dipertemukan dengan pihak yang telah dan akan diperiksa. Kalau itu masalahnya rapat bisa diatur terpisah.

Dalam pertemuan hari ini alasan ketidakhadiran KPK adalah karena pembahasan sudah terkait teknis penyidikan. Baginya hal tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan rapat tertutup, apalagi mekanismenya sudah diatur dalam UU. “Pimpinan KPK yang lama selalu datang kalau kami meminta *progress report*, kenapa di era sekarang ini menjadi alasan,” tandasnya.

Menjawab hal ini Zulkarnaen menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan KPK lainnya. “Kami mohon maaf, nanti kami koordinasikan dengan teman-teman. Hari ini posisinya ada yang sedang umroh dan ada yang melaksanakan tugas lain,” pungkask dia. (iky) Foto: ry/parle.

## Komisi VIII Minta Kemenag Prioritaskan Pembayaran Gaji Guru Honororer



Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa.

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Sekjen Menteri Sosial pada Rabu (29/5) terungkap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anggaran. Salah satunya permasalahan yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Permasalahan tersebut terkait dengan Penambahan Anggaran sebesar 1,5 Triliun yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk mendukung berbagai

program Kementerian Agama. Dalam paparannya, Menteri Agama Suryadharma Alimengatakan bahwa penambahan Anggaran tersebut digunakan untuk Bantuan atau beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebesar 1,3 Miliar. Selain itu tambahan juga digunakan untuk perluasan sasaran BSM, serta kegiatan pembiayaan bidik misi di Perguruan Tinggi Agama sebesar 47,4 Miliar.

Menanggapi pernyataan tersebut, beberapa anggota Komisi VIII DPR RI sangat menyesalkannya. “Ada Para-

digma yang kurang ketat yang Pak Menteri sampaikan, berkaitan dengan alokasi dana tambahan yang diberikan Menteri Keuangan untuk Kementerian Agama, salah satunya digunakan untuk beasiswa bagi siswa miskin. Bukan kami tidak setuju adanya beasiswa bagi siswa miskin, namun melihat dalam laporan Menteri Agama tertera bahwa ada sebagian guru honorer di bawah Kementerian Agama yang belum mendapat tunjangan gaji. Kenapa anggaran tambahan itu tidak diprioritaskan lebih dulu untuk membayar hutang Kementerian agama pada guru-guru honorer agar proses belajar mengajar siswa dapat berlangsung dengan baik,” jelas Ledia Hanifa.

Ditambahkannya, sayang sekali jika beasiswa diberikan untuk siswa miskin

tetapi para gurunya mengajar tidak sepenuh hati karena belum mendapat gaji yang menjadi haknya. Hal senada juga diungkapkan hampir oleh seluruh anggota Komisi VIII lainnya, Hidayat Nurwahid misalnya.

“Saya sangat menyesalkan alokasi penambahan anggaran tersebut, seharusnya sebelum keringat guru itu kering, gaji harus sudah dibayarkan. Hal ini malah sebaliknya, tambahan anggaran malah digunakan bukan untuk menjalankan kewajibannya lebih dahulu, yaitu membayar hutang-hutang gaji guru honorer yang belum dibayarkan,” ungkap Hidayat.

Ia meminta agar Kementerian Agama terlebih dahulu membayarkan gaji guru honorer yang belum dibayarkan



Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nurwahid.

selama beberapa bulan belakangan yang sudah menjadi kewajiban dari Kementerian Agama. (Ayu) Foto: iw/Parle.

## Pemotongan Anggaran BKPM Capai Rp 53 miliar



Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.

Komisi VI DPR RI menggelar rapat anggaran dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri yang juga Menteri Keuangan, Rabu (29/5). Rapat membahas pemotongan anggaran BKPM tahun anggaran 2013 untuk RUU APBN Perubahan 2013.

Komisi VI juga segera melakukan rapat Kelompok Kerja (Pokja) pada Kamis (30/5) untuk melanjutkan pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BKPM. Setelah itu, rencananya hasil rapat Pokja itu akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja kembali dengan Kepala BKPM.

“Raker hari ini merupakan bagian dari pembahasan RUU tentang APBN Perubahan 2013 yang disusun oleh Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami ingin mendengar penjelasan dari kepala BKPM mengenai perubahan

RKA-K/L dalam RUU Perubahan APBN sesuai dengan surat Menkeu No.S-339/MK.02/2013 tertanggal 14 Mei yang berisikan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara atau lembaga pada tahun 2013 dengan melakukan pemotongan pagu anggaran belanja K/L 2013,” jelas Airlangga Hartarto (F-PG) saat memimpin rapat.

Sementara itu Kepala BKPM dalam rapat tersebut menjelaskan, pemotongan anggaran BKPM tahun 2013 sebesar Rp 53.015.696.000 yang berasal dari beberapa kegiatan, di antaranya penundaan pembukaan kantor cabang (*Indonesia International Promotion Center/IIPC*) di 3 negara, yaitu Jerman, Cina, dan India. Hanya kantor cabang yang di Korea Selatan yang terealisasi dari anggaran 2013.

“Pembukaan IIPC di Jerman, Cina, dan India sedang dalam pembangunan dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014,” ungkap Chatib Basri. Pembukaan kantor-kantor cabang juga menunggu persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (mh)foto:odjie/parle

# DPR Prioritaskan Pemotongan Alokasi Belanja Barang Non Operasional



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama.

Komisi V DPR RI menyepakati untuk memprioritaskan pemotongan alokasi anggaran pada belanja barang non operasional dan non prioritas.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker dan RDP Komisi V dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal, BMKG, Basarnas, Bapel-BPLS, dan Bapel-BPWS membahas perubahan RKA-KL dalam RAPBNP 2013, dipimpin Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, di Gedung Nusantara, Senin, (28/5).

Selain itu, lanjut Laurens, DPR dan Pemerintah juga menyepakati memprioritaskan pemotongan alokasi anggaran terblokir yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak mungkin dicairkan sampai akhir tahun anggaran, seperti output cadangan, perjalanan dinas, honorarium, seminar, rapat diluar kantor, sisa dana swakelola, sebagai sumber pemenuhan pemotongan anggaran sesuai dengan kriteria yang ada.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Basarnas, Bapel-BPLS, dan Bapel-BPWS) atas pemotongan/penghematan alokasi anggaran TA 2013.

Laurens mengatakan, Komisi V DPR RI bersama seluruh Mitra Kerja telah sepakat untuk mengagendakan dan pendalaman secara detail terhadap pemotongan atau penghematan serta alokasi anggaran perubahan TA 2013 bagi masing-masing sektor/program (per Eselon I) Kementerian atau Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI pada RDP yang akan datang. (si)foto:wahyu/parle.

## Perlu Badan Khusus di Luar Kemenag Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji

Pakar Hukum Tata Negara yang sekaligus sebagai Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, juga sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Abdul Gani Abdullah Selasa (28/5) memberikan masukan kepada Komisi VIII, terkait RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VIII Humaedi menanyakan apakah memungkinkan jika dibentuk sebuah badan khusus yang akan berfungsi sebagai penyelenggara ibadah haji.

“Selama ini DPR sebagai pengawas dari tahun ke tahun sudah mengawasi Kementerian agama untuk memperbaiki kinerjanya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun dari tahun ke tahun juga perbaikan itu tidak ada. Karena sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2008 bahwa penyelenggara ibadah haji dilakukan oleh Pemerintah. Mungkin kita membuat



Anggota Komisi VIII Humaedi (kanan).

badan khusus yang independen sebagai penyelenggara ibadah haji,” tanya Humaedi.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Gani mengatakan bahwa penyelenggara ibadah haji sudah seharusnya diserahkan oleh sebuah badan khusus yang dijamin oleh Undang-Undang. Karena sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini menjalankan ibadah haji merupakan salah satu bentuk beribadat.

“Badan ini harus dipimpin oleh beberapa pimpinan sehingga tidak ada otoriterisme. Kontruksinya dibawah Presiden, dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri,” jelas Abdul Gani.

Ditambahkannya, selain itu seharusnya penunjukan Amirul Hajj (pemimpin haji) oleh Presiden dilakukan secara bergilir. Amirul Hajj bisa berasal dari berbagai profesi, baik dari masyarakat atau lembaga. (Ayu) foto:ry/parle

## UU Pertembakauan Dirancang Untuk Melindungi Semua Pihak



Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sunardi Ayub saat menerima Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI).

RUU Pertembakauan dirancang untuk melindungi semua pihak, termasuk didalamnya perlindungan terhadap korban dampak rokok. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR RI, Sunardi Ayub saat menerima Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5)

Sunardi menyatakan, bahwa apa yang disampaikan AMKRI memiliki keinginan yang sama dengan DPR, khususnya Badan Legislati bahwa RUU Pertembakauan memang dirancang sejauh mungkin termasuk di dalamnya adalah jaminan perlindungan terhadap korban dampak rokok.

rokok,” jelasnya lagi.

Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini, mengucapkan terima kasih kepada AMKRI, karena telah mengingatkan kita semua dan dirinya sebagai perokok aktif, akan pentingnya kesehatan dan bagaimana dampak buruk dari rokok.

Sunardi berjanji akan mengagendakan Panja RUU Pertembakauan untuk berkunjung ke Rumah Sakit Persahabatan guna melihat secara langsung pasien sebagai korban dari dampak bahaya rokok.

“Karena salah satu pokok pembahasan kita adalah tentang pengendalian dampaknya dalam salah satu bab

“Oleh karena itu, Baleg sedang mencari tutup, sehingga semua terlindungi. Tentunya RUU ini tidak hanya menghidupkan yang satu dan tidak mematikan yang lainnya,” katanya.

di RUU ini,” imbuhnya.

Sunardi menjelaskan, bahwa semua sepakat, dan AMKRI bukan tidak setuju terhadap RUU Pertembakauan ini. Tetapi, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang Etika Perokok di tempat umum, seperti di Rumah Sakit, dekat orang hamil, di ruang ber-AC dan sebagainya. Menurutnya, di berbagai negara lain pun mengaturnya.

“Kita akan mengaturnya didalam RUU ini, tetapi dengan tidak membunuh petani kita, tidak membunuh perindustrian kita. Karena petani dan industri termasuk salah satu asset nasional yang harus dipertahankan. Namun segala dampaknya harus dihindari seminimal mungkin,” tegasnya.

Soal keinginan AMKRI, Sunardi akan memperhatikannya. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kepada bangsa dan negara dalam menciptakan masyarakat yang cerdas di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut, AMKRI menyampaikan pernyataan sikapnya, bahwa AMKRI memiliki *concern* dengan langkah parlemen dalam proses pembuatan RUU yang berhubungan dengan produk tembakau. Namun AMKRI merasa RUU Pertembakauan ini dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan utamanya industri rokok.

“Sebagai masyarakat yang sudah pernah mengalami secara langsung dampak merokok dan kerugiannya, kami ingin menyuarkan aspirasi ke-





pada anggota Dewan agar dapat mendengar dan membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakat lain agar tidak mengalami kerugian yang sama seperti kami,” kata Kencana Indriswari yang menjadi juru bicara AMKRI.

Sebagai amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan, AMKRI meminta, Baleg dalam pembahasan RUU Pertembakauan mengutamakan kepentingan masyarakat dari dampak produk, tidak mengutamakan industri tertentu.

AMKRI juga mengharapkan, Baleg mengunjungi rumah sakit-rumah sakit tempat dimana Baleg dapat menemukan sendiri dampak konsumsi dari produk tembakau tersebut. (sc) Foto:doc/parle.

## BAKN DPR Harapkan Kemenkeu Selesaikan Proses Tindaklanjut Pemeriksaan BPK



Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengharapkan, Kementerian Keuangan segera menyelesaikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya hingga sekarang tindak lanjut hasil temuan BPK masih dalam proses, sebanyak 12 temuan Laporan Keuangan Kemenkeu (BA 015) dan sebanyak 6 temuan untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN).

Demikian kesimpulan rapat BAKN DPR dipimpin Ketuanya Sumarjati Arjoso dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati didampingi jajaran Kemenkeu di Gedung DPR, Selasa (28/5) sore.

Sebelumnya, mengutip jawaban tertulis yang disampaikan Wamenkeu, Sumarjati menyebutkan bahwa beberapa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai atau dalam proses.

Mengenai sistem pengendalian intern Kemenkeu, masih banyak yang belum diselesaikan padahal instansi tersebut telah membuat sistem pengendalian yang baru. Apalagi kata Sumarjati, Kemenkeu menjadi contoh instansi lain dalam pengendalian internal. Terkait dengan LHP BPK atas laporan keuangan Kemenkeu semester I tahun 2012, ditemui masih banyak kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Wamenkeu Anny Ratnawati menjelaskan laporan keuangan BUN-BA 999 dan laporan keuangan BA 015 tahun 2011, fokus pembahasannya terkait dengan laporan keuangan BA 999 dan laporan Kemenkeu. Sesuai UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Menkeu berperan sebagai pengguna anggaran, pengguna barang dan Bendahara Umum Negara (BUN). Karena itu Kemenkeu tidak hanya mengelola anggaran lembaga yang bersangkutan tetapi juga BA 999.

Sebagai pengguna anggaran dan barang, Kemenkeu mengelola aset yang cukup besar, meski demikian tidak berwenang menentukan jumlah uangnya tetapi melakukan administrasi atas dokumen anggaran.

Kemenkeu juga melakukan administrasi terkait dengan pendapatan perpajakan yang cukup besar dan penyumbang utama APBN dimana jumlah wajib pajak (WP) mencapai 23 juta di seluruh Indonesia. Sebagai BUN, Menkeu menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) berdasarkan gabungan dari laporan keuangan BA BUN yang terdiri dari BA 999.01 terkait LK Pengelolaan Utang, BA 999.02 terkait LK Pengelolaan Hibah, BA 999.03 terkait LK Investasi Pemerintah, BA 999.04 terkait LK Penerusan Pinjaman, BA 999.05 terkait LK transfer ke daerah, BA 999.07 terkait LK belanja subsidi dan BA 999.08 terkait LK Belanja lain-lain.

Kemenkeu memiliki 1.072 satuan kerja (satker) sementara seluruh kementerian dan lembaga yang proses dokumentasi anggarannya dilakukan Kemenkeu lebih dari 20 ribu satker, di daerah jumlahnya hampir 16 ribu satker. “Inilah dokumen yang diproses pencatatannya di Kemenkeu,” tegasnya.

Terkait kualitas pemeriksaan keuangan meningkat cukup signifikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya opini audit, dimana tahun 2006 sampai 2007 opininya disclaimer, tahun 2008-2010 opininya adalah wajar dengan pengecualian (WDP) dan tahun 2011 opini wajar tanpa pengecualian.

Untuk LK BA BUN tahun 2011 meningkat dibanding opini tahun 2010 dimana 7 LK terdiri 3 dapat opini WTP dan 4 mendapat opini WDP. Capaian opini

tersebut merupakan hasil dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas LK untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Ditambahkan, LK BA BUN 2011 hampir seluruhnya mendapatkan opini WTP, kecuali hanya satu yaitu BA.999.02 menyangkut hibah masih mendapat WDP. "Hampir semua sudah mendapatkan WTP kecuali hibah. Ini capaian yang baik, meski ada beberapa

temuan audit tahun 2011 yang masih dalam proses," jelasnya.

Menanggapi hal itu anggota BAKN Kamaruddin Syam mengkritisi masalah pemeriksaan, dimana beberapa temuan masih dianggap bermasalah, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Bahkan ada kata-kata perlu diuji kembali bersama BPK. Sesuai UU BPK, laporan hasil pemeriksaan itu selambat-lambatnya 60 hari harus

ditindaklanjuti, kalau tidak maka akan diselesaikan menurut hukum.

"Padahal ini temuan tahun 2011, disampaikan pada awal 2012 sekarang sudah 2013 berarti sudah berulang tahun bukan 60 hari lagi, apalagi masih ada kata-kata akan dipersoalkan kepada BPK," tandas Kamaruddin menambahkan. (mp) Foto: ry/parle.

## Soal Kantor OPM Papua, DPR Sampaikan Keberatan Kepada Dubes Inggris



Anggota Komisi I DPR Hayono Isman dan Muhammad Najib saat menerima Delegasi dari Royal Defence College (Lemhanas Inggris).

Komisi I DPR bahas perubahan iklim, terorisme, persoalan toleransi beragama, dan persoalan pembukaan kantor Organisasi Separatis Papua, dengan rombongan Delegasi dari Royal Defence College (Lemhanas Inggris).

Hal itu mengemuka saat Komisi I DPR mengadakan RDPU dengan Royal College, Inggris di Gedung Nusantara

Isman.

Menurut Hayono, DPR sengaja mengangkat persoalan separatis Papua dan hal itu harus dipahami oleh Pemerintah Inggris mengenai posisi Papua sebagai bagian dari NKRI. "Mereka prinsipnya paham bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia, bahkan PM Inggris mengakui Papua

II, Selasa, (28/5).

"Parlemen Indonesia telah menyampaikan keberatannya kepada Dubes Inggris atas pembukaan Kantor Organisasi Separatis Papua di Oxford," ujar anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua BKSAP Hayono

sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI," paparnya.

Pada kesempatan itu, Hayono juga mengemukakan DPR juga membahas persoalan toleransi antar umat beragama dengan delegasi Lemhanas Inggris. Pasalnya, tanpa toleransi tentunya akan memunculkan friksi, kebencian, serta tindakan teror yang menghasilkan terorisme.

"Toleransi harus menjadi perhatian, dan parlemen mendukung protokol terhadap penistaan agama sehingga dengan demikian kita meminta dukungan dari Inggris terhadap soal tersebut," paparnya.

Dia menjelaskan, demokrasi bukan berarti bebas tetapi harus bebas bertanggung jawab jangan sampai bebas tidak terarah dan dapat mengganggu proses demokrasi yang ada. (si) foto:iwan armanias/parle.

## DPR Setujui Penghapusan Piutang Lima PDAM

Akhirnya, setelah melalui tiga kali Rapat Paripurna, DPR menyetujui penghapusan piutang terhadap lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam rapat sebelumnya, masih ada perbedaan pendapat antar anggota dewan, sehingga belum menemukan titik temu.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyatakan bahwa Pimpinan DPR sudah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi V, Pimpinan Komisi XI, dan juga Pimpinan Badan Anggaran (Banggar). Dalam rapat pimpinan itu telah disepakati beberapa hal.

"Pertama, Komisi V melakukan

penelaahan teknis terkait dengan persoalan PDAM. Kemudian hasil penelaahan ini disampaikan kepada Komisi XI dan Banggar, dan kemudian dilakukan penelaahan secara finansial. Kemudian, mereka membuat keputusan terkait penghapusan piutang tersebut," ujar Sohibul ketika memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

II, Selasa (28/5).

Terkait dengan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sohibul memastikan bahwa piutang PDAM tidak harus mendapat rekomendasi BPK.

“Piutang PDAM itu tidak termasuk kategori yang harus mendapat rekomendasi dari BPK. Tapi dari telaahan kami, sebelum ada usulan dari pemerintah ini, ternyata sudah ada *financial audit* dari BPK. Dengan demikian se-

luruh proses sudah dilakukan,” lanjut Sohibul sambil mengetok palu yang berarti rapat menyetujui penghapusan piutang.

Namun, sesaat setelah palu diketok, Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding meminta pimpinan rapat untuk menarik kembali keputusan penghapusan piutang. Dan menegaskan bahwa rekomendasi dari BPK tetap penting.

“Saya harap keputusan yang diketok pimpinan dicabut kembali. Satu anggota yang tidak setuju pada satu keputusan sesuai Tata Tertib pasal 275, pengambil keputusan harus dengan suara terbanyak. Jika persyaratan terkait dengan rekomendasi BPK tidak terpenuhi, saya tetap tidak setuju terhadap penghapusan piutang ini,” tukas Sudding.

Sementara itu, Anggota Komisi III Dimiyati Natakusumah menyatakan bahwa putusan penghapusan utang itu seharusnya tidak membawa-bawa DPR. Putusan piutang ini cukup dilakukan pemerintah.

“Utang itu seharusnya ditangani saja sama pemerintah, jangan melibatkan



Anggota Komisi III Dimiyati Natakusumah.

DPR. Agar tidak melebihi Rp 100 miliar, maka sebaiknya dicicil,” ujar anggota yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi ini.

Total utang kelima PDAM ini mencapai Rp 1,04 triliun. Penghapusan dilakukan pada beban bunga dan denda saja, bukan piutang pokok. Rinciannya, PDAM Semarang dengan nilai piutang Rp 238,1 miliar, PDAM Tangerang Rp 272,5 miliar, PDAM Bandung sebesar Rp 252,7 miliar, PDAM Palembang Rp 160,1 miliar, dan PDAM Makassar sebanyak Rp 121,3 miliar. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR RI Perpanjang Masa Keanggotaan KPI Pusat

DPR RI Menyetujui Perpanjangan Masa Keanggotaan Komisi Penyiaran Pusat (KPI Pusat) Periode 2010-2013, agar tidak terjadi kevakuman Kepengurusan dalam KPI Pusat hingga DPR telah menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 yang terpilih kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (28/5).

“Terkait dengan masa keanggotaan Periode Pusat Periode 2010-2013 yang berakhir pada tanggal 25 Mei 2013, Komisi I DPR RI sedang melakukan proses tahapan seleksi rekrutmen calon anggota KPI Pusat Periode 2013-

2016, yang sampai dengan akhir bulan Mei 2013 telah memasuki tahap seleksi tahap berkas lamaran Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016,” tegas Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan saat menyampaikan Laporan Komisi I mengenai Perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Pusat Periode 2010-2013.

Dalam melaksanakan proses seleksi rekrutmen, Komisi I mengikutsertakan Akademisi, Pengamat, Praktisi Media, Psikolog, Budayawan, dan Organisasi Masyarakat sebagai Panitia Seleksi. Pengumuman Pembukaan calon keanggotaan KPI Pusat ini telah dilakukan melalui media cetak, spanduk, dan iklan layanan masyarakat di 11 televisi yang bersiaran nasional, serta melalui Website KPI.

Komisi I menjadwalkan seluruh



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

tahapan proses seleksi termasuk proses *fit and proper test* terhadap Calon anggota KPI Periode 2013-2016 akan selesai sebelum berakhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

“Selambat-lambatnya pada tanggal

13 Juli 2013, DPR telah menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 yang terpilih kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden,” kata Ramadhan Pohan.

Sehingga 9 Anggota KPI Pusat peri-

ode 2010-2013 atas nama Mochamad Riyanto, Azki Tri Rezeki Widiyanti, Dandang Rahmat Hidayat, Azimah, Nina Mutmainnah, Idy Muzayyad, Iswanti Syahputra, Judhariksawan, dan Yazirwan Uyun, masih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sampai dengan ditetapkannya Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 oleh Presiden. (as)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Setujui Perpanjangan Masa Keanggotaan BSBI



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

Rapat Paripurna hari ini, Selasa (28/5) memutuskan memperpanjang masa keanggotaan tiga anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Tiga Anggota BSBI yang disetujui adalah Umar Juoro, Ahmad Erani Yustika, dan Marsuki. Sedangkan, Rama Pratama tidak dilanjutkan karena mengundurkan diri.

Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang memaparkan, sebagai tindak lanjut surat dari Presiden nomor R-12/Pres/03/2013, perihal calon ang-

gota BSBI, pada 4 April 2013 lalu Badan Musyawarah (Bamus) mengadakan rapat dan memutuskan, menyetujui pembahasan calon anggota BSBI periode 2013-2016 diserahkan kepada Komisi XI dan menyetujui pembahasan perpanjangan keanggotaan Badan BSBI periode 2010-2013, yaitu Umor Juoro, Rama Pratama, Ahmad Erani Mustika, dan Marsuki.

“Terkait dengan penugasan tersebut dan berdasarkan pasal 58A UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2009, maka Komisi XI melakukan *fit and proper test* terhadap calon anggota BSBI yang disampaikan oleh Presiden pada masa persidangan IV ini,” papar Andi Timo pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II.

Dalam rapat internal yang telah dilaksanakan pada 9 April 2013 lalu, Komisi XI memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan anggota BSBI. Hal ini untuk menghindari kekosongan selama 3 bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan pelantikan anggota BSBI terpilih. Dan terhadap keputusan tersebut, Pimpinan Komisi XI telah menyampaikan kepada Pimpin-

an DPR melalui surat nomor 119/MSIII/KOM.XI/2013, tanggal 9 April 2013.

“Namun demikian, berdasarkan surat Rama Pratama kepada Pimpinan DPR RI yang ditembuskan kepada Komisi XI DPR RI tanggal 6 Mei 2013, mengenai pengunduran diri untuk diperpanjang sebagai anggota BSBI, maka Komisi XI DPR RI menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI melalui surat No. 225/MSIV/KOM.IX/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 bahwa Komisi XI menyetujui pembatalan perpanjangan anggota BSBI periode 2010-2013 atas nama Rama Pratama,” jelas politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, Komisi XI menyetujui perpanjangan masa keanggotaan BSBI selama 3 bulan sejak berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan pelantikan anggota BSBI terpilih atas nama Umor Juoro, Ahmad Erani Mustika, dan Marsuki.

“Selanjutnya, persetujuan terkait dengan BSBI ini akan ditindaklanjuti dengan peraturan yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menutup rapat. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## Calon Anggota BPKN Disetujui Komisi VI

Komisi VI DPR telah melakukan pembahasan terhadap para calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2013-2016. Hasil pembahasan dalam rapat internal Komisi VI tersebut telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Senin malam (27/5).

“Kami tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui, tapi kami hanya menilai, kemudian menyimpulkan layak atau tidak layak,” kata Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Senin malam dengan Menteri Perdagangan.

Seperti diketahui, Komisi VI pada Senin siang (27/5), telah melakukan semacam *fit and proper test* kepada semua calon anggota BPKN 2013-2016 untuk mengetahui visi dan misinya. “Sebanyak 23 nama calon anggota BPKN telah mengikuti secara baik. Setelah mendengarkan visi dan misi pada RDPU dan rapat intern, Komisi VI DPR



Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

menyimpulkan bahwa 23 calon anggota BPK tersebut layak untuk menjadi anggota BPKN periode 2013-2016,” ungkap Erik yang didampingi Benny K

Harman (F-PD) dalam rapat tersebut.

Selanjutnya, pengangkatan para calon anggota BPKN tersebut segera diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi VI segera memberikan nama-nama tersebut ke Pimpinan DPR, lalu diserahkan kepada Presiden RI. “Semoga anggota BPKN 2013-2016 dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya,” kata Erik.

Adapun 23 nama calon anggota BPKN yang telah diajukan ke Komisi VI mewakili dari berbagai unsur. Unsur pemerintah 5 orang, pelaku usaha 3 orang, lembaga perlindungan kon-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana.

sumen swadaya masyarakat (LPKSM) 4 orang, akademisi 7 orang, dan tenaga ahli 4 orang. (mh) Foto: iw/od/Parle.

## Akhirnya DPR Setujui Pelaksanaan Kurikulum 2013

Akhirnya, Komisi X DPR menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013 yang akan dimulai pada 15 Juli 2013. Hasil ini didapat setelah Komisi X melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh dan mendengar pandangan mini fraksi atas kurikulum yang direncanakan menghabiskan dana sebesar Rp. 829.427.325.000 itu.

“Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, Komisi X menyepakati soal implementasi serta anggaran Kurikulum 2013, dengan komposisi 6 fraksi setuju, dan 3 fraksi masih keberatan,” jelas Ketua Komisi X Agus Hermanto ketika raker di Gedung Nusantara I, Senin (27/5) malam.

Fraksi yang menyetujui untuk segera dilaksanakan Kurikulum 2013 adalah F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PKB, F-Gerindra, F-Hanura. Sementara itu, fraksi yang menolak F- PKS dan F-PPP, sementara itu F-PAN menyetujui hanya untuk dilakukan uji coba (*piloting*).

Pandangan mini F-PD yang disampaikan oleh Jefirstson R Riwo Kore



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto berjabat tangan dengan Mendikbud M. Nuh.

menyetujui implementasi dan anggaran kurikulum, dan menyarankan agar dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

“Sehubungan masih adanya perdebatan konten kurikulum, F-PD menyerahkan pada pemerintah. F-PD juga menyetujui anggaran sebesar Rp 829 milyar. Kami juga menyarankan implementasi sesuai jadwal, yaitu pada Juli 2013, termasuk persiapan harus dipersiapkan secara maksimal,” papar Jefirstson.

Sedangkan, F-PDIP meminta perlu adanya pengawasan yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait

dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Selain itu, F-PDIP juga berharap agar Kurikulum 2013 dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bersaing dengan negara lain, dan mengedepankan budi pekerti.

Sementara itu, sebagai fraksi yang menolak pelaksanaan Kurikulum 2013, F-PKS menilai kurikulum baru ini dinilai belum siap diimplementasikan. Termasuk pelatihan guru yang

terkesan dipaksakan.

“Manajemen kurikulum tidak matang, ada perubahan anggaran, koordinasi dalam anggaran perlu lebih dipersiapkan. Pelatihan guru saat ini juga terkesan dipaksakan. Persiapan buku tidak sesuai prosedur. Standar isi buku belum ada, tapi ternyata proses pengadaan buku sudah dilakukan. Bagaimana mencetak buku tetapi belum ada isinya?” tanya Anggota Komisi X Raihan Iskandar yang mewakili F-PKS menyampaikan pandangan mini fraksinya.

Dengan disetujui oleh DPR, Kemendikbud siap mengimplementasi-

kan pada 15 Juli 2013 di 6.325 sekolah yang ada di Indonesia. Anggaran yang diajukan sebesar Rp. 829.427.325.000 dan telah disetujui oleh DPR.

Awalnya, anggaran yang diusulkan Kemendikbud dan disepakati oleh Komisi X sebesar Rp 1.153.240.976.000. Namun, setelah dilakukan evaluasi mendalam dan hasil audit BPKP, anggaran Kurikulum 2013 hanya membu-

tuhkan Rp. 829.427.325.000, sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp 323.813.651.000. Alokasi dana sisa itu akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi persetujuan dari Komisi X, M. Nuh menyatakan akan segera mempercepat proses persiapan Kurikulum 2013 dengan segera melakukan

pelatihan guru dan persiapan dokumen lainnya.

“Kami memberi penghargaan dan terimakasih sebagai bagian demokrasi. Kami menghargai catatan yang diberikan oleh fraksi. Intinya kami bersyukur meski dengan keterbatasan, Kurikulum 2013 bisa disetujui,” tutup Nuh.(sf)

Foto: od/parle.

## Komisi IX Minta Program Grand Design Bagi Pekerja Permanen

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu (F-PDIP) meminta program *Grand Design* bagi pekerja permanen di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pasalnya sejak dirinya menjadi anggota Komisi IX, programnya tetap sama yaitu dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“Saya ingin menanyakan bagaimana *grand design* untuk pekerja permanen. Kalau tadi yang sementara antara lain adalah dengan menggunakan pembangunan jalan-jalan dan sebagainya,” kata Sri saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar dan jajarannya, membahas perubahan RKA KL RUU Perubahan TA 2013, di Senayan Jakarta, Senin (27/5)

Saat ini, menurutnya yang dibutuhkan bukan yang sementara, tapi justru yang permanen. “Tidak mungkin orang hanya bekerja dalam satu bulan, setelah itu tidak makan, tidak mungkin puasa terus,” jelas Sri.

Oleh karena itu, kata Sri, yang paling penting adalah bagaimana pekerjaan permanen yang akan kita selenggarakan. Sri mempertanyakan, sebenarnya jika dikaitkan dengan Kementerian-kementerian lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berapa bagian Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini dimaksudkan agar jelas arahnya. Sri juga mempertanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan Kemenakertrans.

“Karena di kota Malang saja di kota kami, setiap tahunnya akumulasi yang



Anggota Komisi IX DPR Sri Rahayu.

mencari tenaga kerja belum mendapatkan tempat, setiap ada kelulusan digabungkan dengan yang lain-lain itu setiap tahunnya mencapai 5.000,” imbuhnya.

“Jika disini kita hitung, menghitung dari yang sementara saja itu tadi disampaikan ada 261.231 orang, anggap saja itu dibagi 500 Kabupaten di seluruh Indonesia, masing-masing hanya sebagian 500 untuk itu yang sementara. Lalu bagaimana dengan yang lainnya,” papar Sri.

Dijelaskan Sri, bahwa sekarang ini musimnya PHK, tentunya banyak pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaannya kembali. Apa yang disampaikan dalam peraturan menteri terkait dengan *outsourcing* itu ternyata tidak berdampak di masyarakat dalam arti di daerah kota maupun kabupaten.

“Artinya sampai hari ini *outsourcing* masih berjalan sebagaimana yang

sebelumnya dilakukan, seperti sistem kontrak tiap tahun bahkan yang enam bulan itu masih berjalan. Dan ketika Reses, yang masyarakat tanyakan pasti satu yaitu bagaimana lapangan pekerjaan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Menakertrans, Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 yang diajukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp 1.978.920.872.000,-.

Usulan tambahan anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 tersebut, untuk pemenuhan kegiatan penting yang mendesak namun belum tertampung dalam program tahun 2013, melalui program Perluasan kesempatan kerja dan program Mendukung Pembangunan, Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.

Program Perluasan kesempatan kerja sebanyak 261.231 orang melalui kegiatan Padat Karya Infrastruktur untuk membangun jalan pedesaan sepanjang 2.970 Km di daerah tertinggal, kawasan MP3EI dan 159 kantong TKI, dengan usulan anggaran sebesar Rp 750.000.000.000,-.

Program Mendukung Pembangunan, Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi yang aksesibilitasnya perlu diintegrasikan dengan program MP3EI pada 48 kawasan, 32 Kabupaten di 11 Provinsi dengan usulan sebesar Rp 1.228.920.872.000,-. (sc) foto:ry/parle/iw.

# Kenaikan BBM Bukan Opsi Yang Baik



Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng menyatakan bahwa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut subsidiya bukan merupakan opsi yang baik untuk masyarakat. Ia melihat kebingungan pemerintah dalam opsi menaikkan BBM.

“Pemerintah selalu terjebak dalam opsi menaikkan BBM ketika menghadapi persoalan *lifting*. Bukannya mencari jalan keluar lain, malah mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM dan memberikan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Padahal

program ini tidak akan berjalan bagus karena kemiskinan struktural di berbagai daerah,” cetus Melchias ketika Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Kepala BPS Suryamin di Gedung Nusantara I, Senin (27/5).

BLSM, tambah Melchias, tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat. Ia melihat, program bantuan yang direncanakan akan berjalan selama lima bulan ini tidak akan memperbaiki kondisi di masyarakat karena banyaknya ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI Sadar Subagyo menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memangkas belanja, agar keseimbangan primer Indonesia yang negatif selama dua tahun berturut-turut tidak berkelanjutan.

“Ini dosa fiskal paling besar. Untuk membayar cicilan, negara harus membuat utang baru. Untuk tahun 2013 Indonesia membuat utang baru sebesar Rp 223 triliun. Jika ini dibiarkan, Indonesia akan terjerembab ke dalam utang yang terus membengkak. Kita hanya akan mewariskan utang kepada anak cucu kita,” tegas Sadar.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Maruarar Sirait menilai bahwa pemerintah agar segera menaikkan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah. Salah satunya pada sektor batu bara.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan yang riil dengan menaikkan

pajak untuk beberapa sektor seperti batu bara. Cukai untuk industri batu bara dinaikkan menjadi 20 persen untuk menambah pendapatan pemerintah. Saya rasa pemerintah bisa mencatatkan 20 persen untuk cukai ekspor batu bara, dan mereka setuju jika bisa dinaikkan asalkan pungutan liarnya diberantas,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dalam paparannya, Menkeu Chatib Basri mengatakan APBN Perubahan (APBN-P) diperlukan, karena adanya perbedaan asumsi makro diantaranya penerimaan yang mengalami penu-



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait.

runan dan pengeluaran negara mengalami peningkatan yang signifikan.

“Hal itu terlihat dalam pertumbuhan perekonomian diperkirakan 6,8 persen, tapi realisasinya hingga triwulan I tahun 2013 hanya 6,02 persen. Sedangkan harga minyak mentah dunia (ICP) harganya ditetapkan US\$ 100/ barel, padahal realisasinya US\$ 108 dolar/ barel, demikian pula dengan inflasi asumsi 4,9 persen, terakhir terlihat 5,57 persen,” papar Chatib.

Mantan Kepala BKPM ini menyatakan penerimaan migas tidak seperti yang diperkirakan, akibat dari pelemahan ekonomi global, yang juga mempengaruhi permintaan terhadap komoditi dalam negeri. Implikasinya, penerimaan pajak mengalami penurunan, dan disisi lain harga migas mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh kepada pengeluaran negara. (sf)/foto:odjie/parle/iw.



Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo.

# Ongkos Politik Tidak Harus Mahal, Yang Penting Bantu Program Bermanfaat Bagi Masyarakat.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka diskusi politik bertajuk “Marketing Politik Haruskah Mahal”.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, ongkos politik untuk terjun sebagai anggota Dewan tidak harus mahal, yang penting bisa menyajikan program atau kegiatan yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat. “Yang penting kecerdasan harus dibangun kalau seorang akan menjadi calon legislatif,” katanya saat menyampaikan sambutan pada acara diskusi politik bertajuk “Marketing Politik Haruskah Mahal” di Operation Room Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Dalam acara ini hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti, pembicara Prof. Firmanzah yang juga staf khusus Presiden bidang ekonomi, anggota FPD Perjuangan DPR Arif Budimanta, Pimpinan Cides Rudi Wahyono dan sejumlah mahasiswa dari UIN, UNJ dan UGM.

Selanjutnya Ketua DPR mengutarakan pengalamannya betapa sebagai calon anggota Dewan harus bertarung di Dapil DKI dengan sejumlah tokoh dari partai lain. Untuk menarik massa juga harus memiliki pola yang tepat se-

suai desain kampanye dengan berbagai cara. Seperti membuat buku, bulletin Jumat, edaran di masjid dan menemui tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta membuat poster dan kampanye di media massa.

Sedangkan kegiatan kampanye ia mengakui membantu masyarakat berupa *fogging* (semprot) untuk mencegah demam berdarah. Kegiatan ini ternyata sangat bermanfaat, mencegah DBD, memberi lapangan kerja untuk mengoperasikan *fogging* dan biayanya tidak mahal. Selain itu berkordinasi dengan RT dan RW setempat sehingga akan lebih dikenal masyarakat pada setiap kegiatan yang dilakukan.

“Jadi ongkos politik tidak harus mahal, yang penting ada manfaat dan bisa memberi lapangan kerja. Saya sampaikan pengalaman dari sisi praktik sedangkan nanti Firmanzah yang banyak teori,” tambah Marzuki Alie.

Sedangkan Firmanzah mengatakan, apakah marketing politik harus mahal,

tergantung beberapa faktor. Kalau modal sosial dan kapitalnya cukup maka berpeluang besar untuk lolos. Contohnya Budiman Sujatmiko, dia terkenal aktifis hanya sekian juta akhirnya terpilih menjadi anggota DPR karena modal sosialnya cukup.

Yang paling sial, lanjutnya modal sosial maupun kapitalnya tidak ada, maka akan susah terpilih jadi anggota DPR. “Maka kenali dulu diri anda sebelum terjun ke politik. Akan lebih efektif dan efisien kalau menguasai marketing politik,” jelas Firmanzah.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyambut baik diselenggarakannya diskusi ini bersama Cides, dan DPR terbuka untuk acara diskusi publik sebab akan memberikan pencerahan kepada generasi muda untuk lebih memahami politik yang pada gilirannya ikut berpartisipasi aktif pada pemilihan umum mendatang. Apalagi sambungnya, pada pemilu mendatang terdapat sekitar 32 juta orang adalah pemilih pemula terdiri pemuda dan mahasiswa. (mp)





# Ansory Siregar Gantikan M.Syahfan Sampurno Jadi Wakil Ketua BURT



Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Taufik Kurniawan berjabat tangan dengan Pimpinan Baleg yang baru Ansory Siregar (F-PKS).

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra Taufik Kurniawan memimpin pergantian Wakil Ketua BURT dari Fraksi PKS, Ansory Siregar menggantikan Muhammad Syahfan B. Sampurno.

“Pergantian ini telah menjadi telaah Fraksi dan Kesekjenan untuk melakukan pergantian tersebut, dan itu sesuai

surat yang diterima dari Fraksi PKS,” ujar Taufik Kurniawan dihadapan anggota dan pimpinan BURT, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (30/5).

Menurut Taufik, pergantian ini sesuai dengan Pasal 85 ayat (8) berbunyi Penggantian pimpinan BURT dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan

an untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR. “Apakah semua ini dapat disetujui,” tanya Taufik kepada anggota BURT.

Kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota BURT DPR RI yang hadir, akhirnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan secara simbolis menyerahkan palu pimpinan kepada Anshari Siregar. “Pak Ansory cukup memberikan warna di badan kehormatan, mudah-mudahan begitu juga di BURT,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BURT

Ansory Siregar mengharapkan masukan dan dukungannya kepada anggota BURT sehingga dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan kinerja DPR sebagai lembaga tinggi negara. “Ini harus dikawal bersama,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi IX Tolak Pemotongan Anggaran 2013 Kemenakertrans

Komisi IX DPR RI menolak pemotongan anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Tahun 2013 sebesar Rp 307.315.159.000,- (Tiga Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Penolakan ini, menanggapi paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX yang dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning,

membahas Perubahan RKA KL RUU Perubahan Tahun 2013, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/5)

Anggota Komisi IX, Budi Supriyanto (F-PG) menyatakan menolak pemotongan anggaran Kemenakertrans tersebut. Menurutnya ini merupakan modus pemerintah, bahwa setiap kali membahas anggaran perubahan selalu ada instruksi pemotongan dari Menteri Keuangan yang besarnya kira-kira hampir sepuluh persen.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius merancang anggaran, padahal dalam pembahasan anggaran ada tahapan-tahapan sehingga muncul anggaran ini yang kemudian dibahas oleh Komisi,” tegas Budi.

“Sehingga kita di sini terus terang menolak pemotongan. Seolah-olah waktu kita terbuang untuk membahas yang tidak penting,” tambahnya.

Namun, Budi menyetujui usulan



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning didampingi Wakil Ketua Nova Riyanti Yusuf saat memimpin rapat.

tambahan anggaran Kemenakertrans Tahun 2013 sebesar Rp 1.978.920.872,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

“Saya setuju usulan kedua, tetapi harus dibahas per Dirjen lebih detail. Karena juga mau kita lihat, kenapa sampai pencapaian ini penyerapannya

baru 20%, kerjanya apa padahal sudah hampir pertengahan tahun. Jangan mengajukan penambahan tetapi penyerapannya rendah,” terang Budi.

Usul penolakan atas pemotongan anggaran Kemenakertrans Budi ini, kemudian disetujui seluruh anggota Komisi IX DPR RI.

Sebelumnya dalam kesempatan

yang sama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyampaikan adanya pemangkasan anggaran yang diakibatkan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2013 tentang Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja K/L Tahun 2013, alokasi pemotongan pagu anggaran Kemenakertrans sebesar Rp 307.315.159.000,- atau sebesar 6,32% terhadap pagu anggaran Kemenakertrans sebesar Rp 4.863.088.570.000,-.

Selain pemotongan anggaran, disampaikan pula usulan penambahan anggaran Kemenakertrans sebesar Rp 1.978.920.872.000.

“Usulan tambahan ini untuk memenuhi kegiatan penting yang mendesak namun belum tertampung dalam program tahun 2013 dalam rangka menangani masyarakat miskin, sangat miskin dan hampir miskin yang paling terkena dampak negatif oleh kenaikan harga BBM,” terang Muhaimin. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

## Anggota DPR Sayangkan Bila Benar KPU Terima Dana Asing



Anggota Komisi II DPR Rahadi Zakaria.

Anggota Komisi II DPR Rahadi Zakaria menyatakan sangat menyayangkan bila benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima bantuan dana asing. Bantuan dana asing itu bisa

mengurangi kewibawaan lembaga yang mengurus dan mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Hal itu dikatakannya menjawab Parle sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR Selasa (28/5), menanggapi pernyataan Jery Sumampow mengenai dugaan aliran dana dari Agency for International Development (AusAID) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Dana paling besar yang masuk ke Indonesia oleh AusAID merupakan lembaga donor yang disalurkan dari Pemerintah Australia masuk ke Indonesia lewat Bappenas,” ujar koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePI) Jery Sumampow. Menurutnya, hal itu menjadi sangat berbahaya ketika lembaga negara mendapatkan dana dari pihak asing maka independensi akan

dapat tergadaikan.

Lebih lanjut Rahadi mengatakan, KPU sebagai lembaga independen harus menjaga betul kemandiriannya. Karena itu, selaku anggota Komisi II DPR yang berpasangan kerja dengan KPU dan Bawaslu akan ditanyakan dalam rapat dengar pendapat mendatang, mengapa hal itu bisa terjadi. Ditegaskan kembali, KPU sebagai lembaga mandiri tidak boleh dipengaruhi dan diintervensi apalagi lembaga tersebut telah mendapatkan anggaran dari pemerintah.

“Jadi esensi kemandirian itu perlu ditelaah kembali, karena selama ini ditegaskan KPU tidak boleh diintervensi termasuk oleh DPR. Implementasi dari kemandirian itu termasuk tidak boleh ada bantuan dari asing,” tambah politisi PDI Perjuangan ini. (mp)/foto:iwan armanias/parle.



# DPR Setujui Pemekaran Musi Rawas Utara



Suasana rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR dengan Dirjen OTDA.

*Jalan-jalan ke Pulau Sumatera,  
Jangan Lupa membawa Sutera,  
Segera Mekarkan Muratara,  
Supaya Masyarakat Sejahtera*



Anggota Komisi II DPR Gamari Soetrisno.

Demikian puisi singkat yang di bacakan oleh Anggota Komisi II DPR Gamari Soetrisno dalam rangka persembahkan menyongsong pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Musi Rawas Utara (Muratara), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5) saat RDP Panja Komisi II DPR dengan Dirjen OTDA, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Dirjen

Perundang-Undangan Depkumham, Komite I DPD RI, jajaran Pemprov Sumsel, Pemprov Jambi, Bupati Musi Rawas, Bupati Banyu Asin, Bupati Sarolangun.

“Puisi yang saya persembahkan ini berisi suara hati masyarakat Musi Rawas Utara yang saya coba menangkapnya, dan sesungguhnya saya salah seorang yang paling berbahagia dihari ini, karena saya sebenarnya adalah wong kito galo juga, dengan demikian saya akan tetap berjuang dan tidak akan berhenti berjuang demi memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara,” kata Gamari yang juga politisi F-PKS ini.

Dukungan serupa dikatakan oleh anggota Komisi II lainnya Murad U. Nasir, menurutnya dengan segala hati yang terbuka dan kerelaan yang sangat, menginginkan lahirnya dengan cepat Kab. Musi Rawas Utara, “Momentum politik ini akan tercatat dalam sejarah perpolitikan kita, demi menentukan lahirnya sebuah DOB Kab. Musi Rawas Utara, yang tidak hanya milik masyarakat Musi Rawas Utara tetapi menjadi milik kita semua,” tegas Murad yang juga Politisi partai Golkar ini.

Demikian juga yang dikatakan ang-



Anggota Komisi II DPR Murad U. Nasir.

gota Komisi II Markus Nari, menurutnya sejak awal Komisi II DPR bersama-sama telah bersepakat dan bertekad untuk melakukan pemekaran di daerah-daerah yang betul-betul harus dimekarkan, namun katanya, jangan sampai pemekaran menjadi konflik di daerah itu, sehingga daerah pemekaran tersebut tidak bisa mekar seutuhnya.

Ia menegaskan, Komisi II DPR juga tidak bisa didesak oleh kepentingan atau kelompok apapun, “Kita memekarkan karena kepentingan yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tegasnya. (nt)foto:wahyu/parle



Tim Pengawas Century DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI/Korekku Sohibul Iman menerima Delegasi Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan Aliansi Waria Anti Korupsi (Awak) di Gedung Nusantara DPR RI. Rabu (29/5). Foto: Wahyu/Parle.



Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Charil Mahfiz membahas perubahan RKA-K/L RUU Perubahan APBN 2013. Rabu (29/5) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto membahas perubahan RKA-K/L RUU Perubahan APBN 2013. Kamis (30/5) Foto: Iwan Armanias/Parle.